



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARKUS DIANTORO**
2. Jabatan : **KETUA LEMBAGA**
3. NHK : **633456**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.050.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 291 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.215.000.000
2. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000
4. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , WARISAN Rp. 370.000.000
6. Tanah Seluas 2600 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 78.800.000**

1. MOBIL, ISUZU PANTHER MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 55.500.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 150 CC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 98.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	152.794.200
F. HARTA LAINNYA	Rp.	90.000.000
Sub Total	Rp.	3.470.094.200
III. HUTANG	Rp.	129.922.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.340.172.200

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.